

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Suatu Studi di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Vaghelina V.Y.Pehingirang¹
Agustinus Pati²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Pemilihan kepala daerah atau seringkali disebut dengan Pilkada adalah merupakan suatu sarana yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar tahun 1945. Pilkada bukanlah suatu capaian atau tujuan dari suatu pemerintahan melainkan hanyalah sebuah sarana dimana dengan lahirnya sebuah sistem pilkada atau pemilu bisah digunakan sebagai kontrol kehidupan berpolitik rakyat. Tetapi lebih dari itu tujuan yang sebenarnya yang hendak dicapai dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan bangsa yang tertuang didalam Undang–Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik di Kecamatan Manganitu Selatan dengan melihat pada bentuk partisipasi politik pemberian suara, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan tingkat Partisipasi Politik Pemilih Kecamatan Manganitu Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pemilih atau masyarakat dalam pemberian suara, menghadiri rapat umum atau kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim sukses yang ada. Selain itu juga salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan pemilih atau masyarakat yaitu menjadi anggota dari partai politik baik sebagai tim sukses serta simpatisan.

Kata Kunci : Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah atau seringkali disebut dengan Pilkada adalah merupakan suatu sarana yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pilkada bukanlah suatu capaian atau tujuan dari suatu pemerintahan melainkan hanyalah sebuah sarana dimana dengan lahirnya sebuah sistem pilkada atau pemilu bisah digunakan sebagai kontrol kehidupan berpolitik rakyat. Tetapi lebih dari itu tujuan yang sebenarnya yang hendak dicapai dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan bangsa yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu karakteristik dari suatu pemilu atau pilkada adalah adanya partisipasi dari warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang – kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy). Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam

proses pembentukan kebijakan umum". Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku setiap individu seyogyanya mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam konteks kehidupan politik

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam konteks dinamika perpolitikan. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik sangatlah berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pandangan kemauan tujuan serta kepentingan mereka masing-masing untuk menentukan siapakah yang nantinya akan mereka jadikan pilihan didalam pemilu. Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi atau pilihan kepentingan dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik bagi masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan yang baru akan terbentuk dengan juga segala kebijakan keputusan yang akan dibuat oleh pejabat publik. Sehingga demikian keikutsertaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam berkontribusi pada proses politik yang meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta pengawasan perhitungan suara.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan implementasi demokrasi yang ada ditingkat lokal dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Makna dari

Pemilukada merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang amat besar agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga - lembaga politik dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah melalui pemilukada langsung masyarakat mengharapkan pula agar dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas serta mau mendengarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dari segala lapisan yang ada.

Konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Pemilihan kepala daerah langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi.

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilu khususnya pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota secara langsung partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilukada. Hal itu dipahami mengingat dalam pemilukada secara langsung tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke bilik suara untuk memilih calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan apakah pemilukada dilangsungkan dalam satu putaran atau

dua putaran. Melalui pemilukada masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat dari seorang Kepala Daerah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilihan umum pemilukada harus dilaksanakan dengan demokratis sehingga betul - betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.

Pada bulan Februari tanggal 15 tahun 2017 Kabupaten Sangihe telah mengadakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yaitu pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang diikuti oleh dua pasangan calon dari dua partai politik. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan Dr. Fransiscus Silangen, Sp.B.KB partai yang mengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Pasangan nomor urut 2 Jabes Ezar Gahgana, SE.ME dan Helmud Hontong, SE partai yang mengusung Golongan Karya (GOLKAR) dan Hati Nurani Rakyat (HANURA). Pilkada ini kemudian dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Jabes Ezar Gahgana, SE.ME dan Helmud Hontong, SE dengan perolehan suara 46.899 atau sekitar 55,41 % suara diikuti oleh pasangan nomor urut 1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan Dr. Fransiscus Silangen, Sp.B.KB dengan mendapatkan perolehan suara 37.737 atau sekitar 44,59%. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sangihe berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, partisipasi masyarakat sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sangihe tahun 2011 adalah sebesar 76,21 % dengan total pemilih sebanyak 81.274 orang dari 106.015 orang yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap. Itu berarti ada 24.741

orang atau sekitar 23,33 % yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 partisipasi masyarakat adalah sebesar 79,84% dengan total pemilih sebanyak 85.000 orang dari 106.462 yang terdaftar dalam DPT. Itu berarti pemilihan pada tahun 2017 ada 21.486 orang atau sekitar 20,16% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai angka sebesar 75,70% dengan total pengguna hak pilih 6.628 orang dan pemilih berjumlah 8.837 orang yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah pemilih tetap juga mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang cukup baik dalam upaya menciptakan masa depan demokrasi.

Tingginya partisipasi politik masyarakat khususnya kecamatan Manganitu Selatan dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Pilihan mereka dapat disebabkan oleh berbagai pertimbangan misalnya mereka memilih atas dasar paksaan, ikut-ikutan, bahkan yang sering terjadi adanya politik uang atau money politik di tengah masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tetapi ada yang juga memang berdasarkan pilihannya sendiri. Kenyataan tersebut mengakibatkan

tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Sikap pemilih yang hanya sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Maka banyak oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat yang kemudian menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan dengan tidak sehat.

Disisi lain anggota masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilih dikarenakan bagi mereka memilih dan tidak memilih sama saja tidak akan membawa perubahan bagi kehidupannya. Kurangnya sosialisasi dari KPU terhadap arti pentingnya pemilihan umum kepala daerah juga ikut memicu masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang ada tingkat daerah. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda atau gambar seseorang, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik masyarakat yang perlu ditumbuhkan. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya sebatas bagaimana memberikan suara dalam proses pemilihan, tapi juga sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam proses partisipasi politik lainnya seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan lain sebagainya.

Tinjauan Pustaka

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata "Demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "Cratein" yang berarti kekuasaan atau

kedaulatan (Rudi Salam Sinaga, 2013:31). Jadi Demos-Cratein atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sebuah sistem pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Konsep pokok demokrasi sudah digagas oleh para pemikir/filosof Yunani Kuno salah satunya adalah Aristoteles (384-322 SM) berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas, termasuk diantaranya orang-orang miskin. Ciri pokok konsep demokrasi klasik adalah menyangkut tiga nilai, yaitu persamaan (equality), kebebasan (freedom), penguasaan mayoritas masyarakat (majority ruled). Persamaan karena walaupun tidak punya materi/harta banyak, akan tetapi ia tetap punya hak yang dirumuskan dalam persamaan hak tersebut. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan karena semua manusia pada prinsipnya dilahirkan bebas, termasuk dalam kebebasan perkataan (freedom of speech). Sedangkan penguasaan mayoritas masyarakat terjadi karena keputusan mayoritas berdasarkan jumlah dan solidaritas dari anggota – anggota masyarakat tersebut menjadi kunci kekuatan mereka (Jacobus Ranjabar, 2016:193).

Dalam pandangan Thomas Hobbes, bahwa masyarakat harus dipimpin yang sangat tegas untuk menghilangkan pemaksaan dan pemeriksaan hak atas manusia yang lemah yang lain. Karena itu, konsentrasi kekuasaan harus difokuskan pada satu tempat (lokus) yang disebutnya sebagai “kedaulatan (sovereignty)”. Kekuasaan yang sangat besar itu bisah saja beralih ke tangan satu orang, mungkin ke dalam lembaga-lembaga yang dibuat oleh sejumlah warga dan bahkan dalam lembaga-lembaga bentukan seluruh warga dan

bagian yang terakhir inilah kiranya yang menjadi konsep dasar demokrasi (Samosir, dalam Anthanius Sitepu, 2012:77).

C.F.Strong (Rudi Salam Sinaga, 2013:31) mendefinisikan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Begitu pula yang dikemukakan Charles Costello (Rudi Salam Sinaga, 2013:31) demokrasi dalam konteks kontemporer adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara. Demokrasi mengakui kehendak rakyat sebagai landasan bagi legitimasi dan kewenangan pemerintahan (kedaulatan rakyat) bahwa kehendak itu akan dinyatakan dalam sebuah iklim politik yang terbuka melalui pemilihan umum yang bebas dan berkala. Setiap warga negara memilih pihak yang akan memerintah serta menurunkan pemerintah yang ada kapan saja mereka mau.

Selanjutnya, Rany (Rudi Salam Sinaga, 2013:31) memberikan definisi tentang demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignty), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (political consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas.

Sidney Hook (Zubakhrum Tjenreng, 2016:28) Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas

yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Henry Bayo (dalam Miriam Budiardjo, 2014:117), memberi definisi sebagai berikut : sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya keabsahan politik.

Lebih lanjut, Affan Gaffar (Zubakhrum Tjenreng, 2016:29), mencoba menjelaskan demokrasi ke dalam dua(2) bentuk. Yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis dan dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Demokrasi memiliki banyak arti, namun satu pengertian yang mendasar bahwa demokrasi dapat dipakai untuk mewujudkan kekuasaan yang sebenar-benarnya berada ditangan rakyat dengan menolak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu atau kelompok saja. Diantara makna-makna yang telah dilekatkan pada kata 'demokrasi' adalah (Andrew Heywood, 2014:152) sebagai berikut :

- a. Sebuah sistem kekuasaan oleh yang miskin dan kurang beruntung
- b. Satu bentuk pemerintahan, dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus-menerus, tanpa membutuhkan para politisi professional atau pejabat-pejabat publik.
- c. Sebuah masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan kesempatan dan kebaikan individu, daripada hierarki dan hak istimewa

- d. Sebuah sistem kesejahteraan dan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan-ketidaksetaraan social.
- e. Sebuah sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada prinsip aturan mayoritas.
- f. Sebuah sistem kekuasaan yang menjamin hak-hak dan kepentingan dari minoritas dengan memberlakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kekuasaan dari mayoritas.
- g. Sebuah cara dalam mengisi jabatan-jabatan publik melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat.
- h. Sebuah sistem pemerintahan yang melayani kepentingan-kepentingan dari rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung oleh masyarakat yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Seperti yang diungkapkan Abdul Asri (Harahap 2005:122) mengatakan bahwa: "pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi

merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.

B.C.Smith (Leo Agustino, 2014:43) mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu syarat utama terwujudnya pemerintah daerah yang akuntabel, akomodatif, responsif dan memungkinkan adanya persamaan hak politik di tingkat lokal

Joko Prihatmoko (2009:115) menyatakan bahwa pemilukada adalah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005:10) menjelaskan bahwa: “dalam pemilukada langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Prof. Dr. Sugiyono, 2016:1).

Fokus dari penelitian ini adalah melihat pada partisipasi politik dari pemilih yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Sangihe dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017, menggunakan teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik dengan melihat pada aspek pemberian suara dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye serta menjadi anggota partai politik.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan informan untuk berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun rincian informan dalam penelitian ini yaitu:

- Ketua KPUD 1 Orang
- Ketua PANWAS 1 Orang
- Ketua Partai politik 2 Orang
- Anggota Partai Politik 3 Orang
- Tokoh Masyarakat 3 Orang
- Masyarakat 5 Orang

Hasil Penelitian

Partisipasi Politik Pemilih yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan pada pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 kemarin cukup antusias dikarenakan bisah mencapai presentasi 75,70%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat dikatakan bahwa memang benar ada masyarakat yang menghadiri rapat umum atau kegiatan

kampanye. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan masyarakat dalam berpartisipasi secara sukarela yang didasari oleh pemahaman dan kesadaran berpolitik yang baik. Kegiatan kampanye ini yang digelar dilapangan terbuka, bertujuan agar masyarakat dapat turut serta mengambil bagian secara langsung melihat serta dapat mendengarkan apa yang menjadi visi-misi dari calon yang ada serta menjadikan tolak ukur terhadap penilaian mereka sebelum mereka menentukan pilihan mereka.

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye biasanya sebagian besar masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan meramaikan saja dan hanya terfokus dengan hiburan yang disediakan oleh tim sukses yang ada tanpa menyadari tujuan mereka ikut dalam kegiatan kampanye. Jika ditanya sudah pasti hanya sebagian kecil masyarakat yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan calon baik itu menyangkut visi-misi serta program kerja pada waktu kegiatan kampanye berlangsung. Selain itu juga Peneliti menemukan alasan mengapa begitu besar masyarakat turut ikut dalam kegiatan kampanye karena dari kendaraan sampai biaya transportasi itu semuanya sudah disediakan oleh tim sukses dari masing-masing pasangan calon yang ada sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya kegiatan kampanye.

Terlepas dari itu semua keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri kegiatan kampanye, ini dapat dinilai secara langsung oleh partai politik serta tim sukses sebagai wujud dukungan mereka terhadap pasangan calon yang sudah diusung.

Berdasarkan hasil yang sudah peneliti lakukan, Partisipasi politik Pemilih dalam hal menghadiri kegiatan kampanye sejalan dengan teori Miriam Budiardjo. Hal ini bisah dibuktikan

dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan bahwa mereka turut ikut serta berpartisipasi dalam hal menghadiri kegiatan kampanye pada pemiliha umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 kemarin.

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat baik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Presiden. Mulai dari memberikan suara, mengikuti kegiatan kampanye, dan bahkan bergabung menjadi anggota suatu partai politik atau menjadi tim sukses. Dimana salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen dan pendidikan politik, partai politik diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ketua PAC Partai PDI-P dan Ketua PAC Partai Golkar Kecamatan Manganitu Selatan dapat dikatakan bahwa popularitas partai politik menjadi salah satu alasan masyarakat ingin bergabung dalam suatu partai politik yang ada. Popularitas dari partai politik juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap partai politik. Keinginan masyarakat untuk menjadi anggota dari partai politik dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan seiring dengan popularitas yang dicapai oleh partai politik. Keikutsertaan masyarakat menjadi anggota partai politik dapat berbeda-beda. Misalnya ada masyarakat yang masuk dalam partai politik karena

memang ia sudah lama berada dalam partai politik itu sendiri, menjadi tim sukses serta simpatisan dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang ada.

Membangun kesadaran berpolitik masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu pada memang tidaklah mudah. Kesadaran politik masyarakat akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor yang akhirnya akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis dan pragmatis serta sebaliknya aktif dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pemilu. Setiap pelaksanaan pesta demokrasi seperti pemilu yang diselenggarakan oleh negara memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai lapisan masyarakat.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur utama dalam berdemokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana dalam melaksanakan proses demokrasi, tentu saja tidak bisa lepas dari adanya keterlibatan semua lapisan masyarakat.

Adapun partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan dalam menjadi anggota dari partai politik baik yang menjadi tim sukses serta simpatisan pada pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe tahun 2017 sejalan dengan teori Miriam Budirdjo (Anwar Arifin, 2015:78) bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah bentuk kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kesimpulan

Selain memberikan suara didalam pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017, bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan adalah dengan mereka menjadi peserta dari kegiatan kampanye. Meskipun masyarakat yang ikut dalam kegiatan kampanye baik karena atas keinginan diri sendiri ataupun diajak oleh orang terdekat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar dengan kegiatan politik dan kewajiban sebagai warga Negara yang demokratis.

Tidak hanya dengan memberikan suara dalam pemilu tahun 2017 atau mengikuti kegiatan kampanye salah satu bentuk partisipasi politik yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Manganitu Selatan adalah dengan mereka menjadi anggota partai politik. Dimana masyarakat yang ikut bergabung dalam partai politik sudah lama menjadi anggota partai politik. Sehingga pada pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 anggota masyarakat yang ikut bergabung dalam partai politik banyak menjadi tim sukses dan simpatisan dari pasangan calon yang diusung dari partai politik dan juga mereka aktif didalam mengikuti kegiatan pertemuan atau diskusi politik

yang diselenggarakan oleh partai politik yang ada. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat ingin terlibat secara langsung dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017, tingginya partisipasi politik tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi karena masih ada masyarakat yang memilih hanya sekedar asal ikut seperti halnya ikut pilihan dari keluarga saudara, dan teman dekat. Tanpa mereka sadari dengan mereka menentukan siapa pemimpin mereka, mereka juga ikut menentukan masa depan daerah mereka sendiri. Hal lain yang dapat ditemukan dilapangan bahwa masih maraknya partisipasi politik masyarakat yang bersifat dimobilisasi dengan adanya praktik money politik. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa mendorong masyarakat menerima praktik money politik itu sendiri.

Saran

Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan kiranya dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti dikemudian hari yang mau dan ingin meneliti hal yang serupa sehingga mendapatkan temuan hasil penelitian yang baru.

Pemilihan umum kepala daerah sebagai ajang untuk memilih pemimpin di tengah masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara diharapkan masyarakat akan selalu terpenggil untuk lebih berpartisipasi secara langsung. Tidak memiliki sikap apatis dan

pragmatis sehingga partisipasinya tidak mudah dimobilisasi oleh berbagai pihak.

Untuk pemerintah, partai politik serta penyelenggara pemilihan umum haruslah selalu memberikan sosialisasi dalam bentuk informasi kepada masyarakat tentang pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi seperti halnya pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk lebih meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat serta pendidikan politik bagi pemilih dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta
- Arifin, Anwar. 2015. Prespektif Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifuddin. 2015. Metode Penelitian. Edisi Pertama, Cetakan Keenam belas. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Affan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harahap, Abdul Asri. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Mardalis. 2008. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prihatmoko J.Joko. 2009. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Purwoko Bambang. 2005. Isu-Isu Strategis Pemilihan Kepala Daerah

- Langsung:Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Jurnal Swara Politik,Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed.
- Ranjabar, Jacobus. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta,cv
- Tjenreg, Zubakhrum. 2016. Pilkada Serentak:Penguatan Demokrasi di Indonesia.Depok : Pustaka Kemang
- Sodikin, 2014. Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraa. Bekasi: Gramata Publishing
- Sugiyono, 2016.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo
- Syafiie, Kencana Inu. 2013. Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi, Cetakan Keempat. Bandung: Mandar Maju
- Sinaga, Salam Rudi. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu